

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki milenium ketiga, persaingan di dunia usaha dan tantangan pembangunan nasional semakin sulit. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yaitu salah satunya melalui pendekatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, melalui program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah tersebut dalam rangka menjawab tantangan pembangunan nasional melalui program-program yang langsung dapat menyentuh masyarakat.

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional dewasa ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi perekonomian rakyat. Kebijakan pemerintah tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dimana kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 tersebut diungkapkan bahwa bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Oleh karena itu, peran koperasi menjadi penting berkaitan dengan pelaksanaan tujuan di atas.

Koperasi harus tampil sebagai organisasi yang dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi rakyat untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya secara khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, akan tetapi pada kenyataannya koperasi belum menjadi pilihan utama bagi perekonomian di masyarakat.

Koperasi merupakan salah satu wadah ekonomi yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dalam upaya untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Selain itu, koperasi juga merupakan organisasi yang banyak melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan luas dari rakyat serta tentunya pemerintah. Sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat yang sadar akan tujuan, maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dan dalam aplikasinya koperasi di Indonesia masih mengalami permasalahan klasik, baik dalam ruang lingkup internal maupun eksternal.

Koperasi di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Oleh banyak kalangan, koperasi masih diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Didalamnya terkandung muatan kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), kekeluargaan dan

beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten.

Koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia merupakan salah satu bentuk usaha yang mampu bertahan ditengah krisis ekonomi dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional setelah terjadinya krisis. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia perkembangan koperasi di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah populasi koperasi yang meningkat dari 177.482 menjadi 188.181 atau meningkat sebesar 6,03 %, jumlah keanggotaan koperasi yang semula 30.461.121 menjadi 30.849.913 atau meningkat sebesar 1,21 %, jumlah penyerapan tenaga kerja semula 326.718 menjadi 342.896 atau meningkat sebesar 4,95 %.¹ Koperasi pada tahun 2010 memberikan kontribusi terhadap Produk Nasional Bruto (PDB) sebesar 55,6% yang sebelumnya 53% pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 2,6%, ini disampaikan oleh Ahmad Zabadi, S.H., M.M dari Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam Seminar Nasional Ekonomi Koperasi 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 2011 di Gedung Samudera, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional.²

¹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 2010-2011*.

² Ahmad Zabadi, *Menisik Masa Depan Perekonomian Nasional ditinjau dari Sudut Pandang Koperasi dan UMKM*, dalam Seminar Nasional Ekonomi Koperasi, Gedung Samudera Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 10 Februari 2011.

Berdasarkan data dan pernyataan diatas terlihat bahwa koperasi mempunyai kontribusi terhadap pembangunan nasional karena mampu menyerap keaktifan masyarakat dan tentunya tenaga kerja yang dapat meminimalisir masalah pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat memberikan sumbangan pada pendapatan nasional. Akan tetapi dalam realitasnya, koperasi masih menemui kesulitan dalam mengembangkan usahanya menjadi lebih besar, walaupun ada program Pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM RI) yaitu Sadar Koperasi yang salah satu misinya adalah mendorong koperasi menjadi besar.

Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Masalah internal yang dihadapi koperasi diantaranya adalah laba usaha yang minim, rendahnya kualitas atau kompetensi sumber daya manusia dalam kepengurusan, manajemen yang buruk, strategi koperasi yang kurang bersaing, lemahnya jiwa berkoperasi dan terbatasnya faktor permodalan. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi diantaranya adalah sulitnya mendapatkan barang murah yang dapat dijual kembali akibat iklim usaha yang berat, kemitraan yang buruk dan menyangkut perolehan legalisasi serta perizinan formal dari instansi terkait yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan mendasar.

Menyoroti masalah internal koperasi sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Hanya saja perkoperasian di Indonesia tidak mengenal istilah “laba”, karena tujuan kegiatan koperasi tidak saja berorientasi pada laba (*profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat (*benefit oriented*).

Laba dalam koperasi dikenal dengan istilah sisa hasil usaha (SHU). Pada setiap akhir periode pembukuan, koperasi diharapkan dapat menghasilkan SHU yang layak. Tujuan utama koperasi bukanlah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya seperti badan usaha lain, karena tujuan utama koperasi di Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu keuntungan yang diperoleh koperasi yang di dapat seakan-akan didapat wajar-wajar saja.

Sisa hasil usaha inilah yang akan dibagikan kepada anggota koperasi pada akhir tahun yang disesuaikan dengan jasa-jasa anggota kepada koperasi dan dengan sisa hasil usaha inilah koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usahanya. Karena SHU yang diterima seakan sewajarnya saja, maka perkembangan koperasi masih mengalami *stagnant* atau tidak *massive*.

Sisa hasil usaha merupakan salah satu pencapaian koperasi dalam menjalankan usahanya. Perkembangan nilai sisa hasil usaha tersebut dapat mencerminkan bahwa koperasi tersebut apakah sudah dikelola dengan profesional atau tidak. Menurunnya SHU dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya adalah modal koperasi yang menurun, volume usaha koperasi yang menurun, partisipasi anggota yang rendah dan kemampuan manajemen usaha yang rendah.

Setiap usaha koperasi, modal merupakan suatu hal yang sangat memiliki peranan penting, tanpa modal maka sebuah usaha tidak akan dapat berjalan. Modal yang dilakukan untuk kegiatan usaha adalah modal usaha. Pertumbuhan modal usaha dalam koperasi berjalan lambat disebabkan karena kurangnya

partisipasi penanaman modal baik dari dalam ataupun luar koperasi. Terbatasnya modal usaha yang ada dalam koperasi inilah yang menyebabkan sulitnya mengembangkan unit-unit usaha koperasi sehingga akan berefek pada penurunan laba atau sisa hasil usaha.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi dapat terlihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh unit-unit usaha koperasi tersebut. Kegiatan operasional koperasi ini yang akan mendatangkan pendapatan koperasi, dilihat dari volume usaha. Apabila sebuah koperasi ingin meningkatkan pendapatannya, sudah selangkahnya koperasi lebih mengembangkan usaha di setiap unit-unit usaha yang dijalankan. Seperti kita ketahui, bahwa laba yang diinginkan sangatlah tergantung dengan nilai besar atau kecilnya pendapatan yang dicapai. Seringkali terjadi pada koperasi umumnya, unit-unit usaha dalam koperasi tidak berkembang dengan baik, seakan sewajarnya, hanya sebatas bertahan. Para anggota ataupun bukan anggota yang ingin melakukan kegiatan ekonomi di unit koperasi ini pun seakan seadanya. Inilah yang sering dihadapi koperasi, bagaimana meningkatkan volume usaha dari koperasi tersebut. Apabila terjadi penurunan volume usaha koperasi menunjukkan bahwa terjadi penurunan dari nilai pendapatan usaha koperasi sehingga akan berpengaruh terhadap laba atau sisa hasil usaha koperasi tersebut.

Partisipasi anggota di dalam kegiatan usaha koperasi dapat terlihat dalam keikutsertaan anggota dalam permodalan koperasi dan transaksi ekonomi. Partisipasi ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa kegiatan usaha koperasi tersebut berhubungan dengan kepentingan dan kebutuhan anggota, sehingga mutlak dibutuhkan keikutsertaan anggota dalam kegiatan koperasi. Menurunnya

partisipasi anggota koperasi tentunya akan turut menurunkan kegiatan usaha koperasi, sehingga akan berdampak pada penurunan sisa hasil usaha.

Koperasi perlu melakukan pengembangan usaha, karena dengan pengembangan usaha akan memacu koperasi untuk mencari dan menemukan peluang-peluang usaha yang dapat dikelola oleh koperasi sehingga kegiatan usaha koperasi dapat bertahan dan berkembang. Disinilah peran pengurus koperasi dalam mengatur (*manage*) kegiatan koperasi. Pengurus harus memiliki kemampuan manajemen usaha yang baik, karena ini akan langsung berhubungan dengan pendapatan dan omset koperasi tersebut serta implikasinya terhadap sisa hasil usaha.

Mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh koperasi ini harus mendapatkan perhatian lebih agar masalah tersebut dapat diminimalisir dalam rangka menghadapi persaingan dunia usaha yang semakin berat. Di Indonesia, koperasi tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara.

Wawancara peneliti kepada staff Dinas Koperasi dan Perdagangan Sulawesi Utara mengutarakan bahwa koperasi yang ada di Sulawesi Utara sedang dalam proses perkembangan, dan di dalam perkembangannya itu masih terdapat kendala-kendala diantaranya yaitu dalam akses informasi dan minimnya perolehan sisa hasil usaha. Kemudian wawancara kepada Darta Sembiring, SE (Ketua Primer Koperasi Bangun Sejahtera Direktorat Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia) mengatakan bahwa besarnya sisa hasil usaha sangat didominasi oleh besarnya partisipasi modal dan usaha koperasi tersebut. Menurut Aminullah (Staff Biro Pusat Data Bagian Perencanaan Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia), untuk koperasi di daerah-daerah, memang sangat fluktuatif keadaannya, ini bisa disebabkan oleh banyak faktor.

Sulawesi Utara sebagai salah satu provinsi terluar di Indonesia, sehubungan dengan koperasi, banyak koperasi yang tidak dikelola dengan baik yang menyebabkan koperasi tersebut tidak berjalan. Terlihat bahwasanya di provinsi Sulawesi Utara, koperasi tidak dikelola dengan baik, ini menyebabkan koperasi tidak berjalan dengan baik. Menguji layak tidaknya suatu koperasi, Kepala Dinas (Kadis) Koperasi Minahasa Utara (Minut), Dra. Theodora Luntungan melaksanakan pendataan kembali bagi koperasi yang ada di wilayah Minut. Menurut Luntungan bagi koperasi-koperasi yang sudah tidak aktif lagi Ijin Badan Usaha mereka akan dicabut dan untuk koperasi-koperasi yang masih aktif, dalam arti masih berjalan baik dari manajemen maupun bidang usaha, maka koperasi tersebut akan diusulkan untuk dapat bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM³

Menyoroti permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, berikut ini data yang diperoleh peneliti dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tentang perkembangan koperasi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2008-2011.

³Jongkers CF Papia. *Luntungan Lakukan Pendataan Kembali Koperasi*. <http://identitasnews.com/index.php/minahasa-ray/minut/496-luntungan-lakukan-pendataan-kembali-koperasi.html> (diakses tanggal 16 Juli 2012)

TABEL I.1
DATA KERAGAAN KOPERASI PROVINSI SULAWESI UTARA

Tahun (1)	Koperasi Aktif (unit) (2)	RAT (unit) (3)	Modal Sendiri (juta) (4)	Modal Luar (juta) (5)	Modal Usaha Koperasi (juta) (6=4+5)	Volume Usaha (juta) (7)	SHU (juta) (8)
2009	3.211	902	412.988,24	398.277,95	799.119,94	975.685,91	26.875,41
2010	3.185	733	809.883,00	557.719,00	1.355.456,00	1.024.003,00	14.340,00
2011	2.970	639	303.301,01	322.967,00	614.122,02	131.205,67	5.215,04

Sumber : Data Keragaan Koperasi Berdasarkan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara 2010-2011, Kementerian Koperasi dan UKM RI⁴

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan yang cukup drastis pada tahun terakhir 2011 pada modal usaha koperasi, volume usaha dan sisa hasil usaha, yaitu masing-masing 54,69%, 87,18% dan 63,63%

Berdasarkan data dan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa koperasi di Sulawesi Utara mengalami permasalahan yang berkaitan dengan internal koperasi yakni menurunnya jumlah permodalan koperasi dan jumlah volume usaha, sehingga mempengaruhi rendahnya Sisa Hasil Usaha (SHU). Berdasarkan uraian dan aspek diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh Modal Usaha dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi di Sulawesi Utara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pernyataan kritis yang perlu diajukan terhadap permasalahan menurunnya sisa hasil usaha yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

⁴ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Data Keragaan Koperasi Berdasarkan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara 2010-2011*.

1. Apakah terdapat pengaruh modal usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah terdapat pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Apakah terdapat pengaruh partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Sulawesi Utara?
4. Apakah terdapat pengaruh kemampuan manajemen usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Sulawesi Utara?
5. Apakah terdapat pengaruh modal usaha dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Provinsi Sulawesi Utara?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi peneliti hanya membatasi masalah pada “Pengaruh Modal Usaha dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi di Provinsi Sulawesi Utara”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara spesifik masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung Modal Usaha terhadap Volume Usaha pada Koperasi di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Provinsi Sulawesi Utara?

3. Apakah terdapat pengaruh langsung Modal Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi di Provinsi Sulawesi Utara?

E. Kegunaan Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoretis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang modal usaha, volume usaha dan sisa hasil usaha pada koperasi. Juga sebagai bahan yang berguna saat terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi sisa hasil usaha.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan masukan dalam pengembangan koperasi melalui peningkatan modal usaha dan volume usaha guna meningkatkan sisa hasil usaha pada koperasi. Dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika ingin melakukan penelitian yang terkait dengan modal usaha, volume usaha dan sisa hasil usaha pada koperasi.